

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Ciamis**

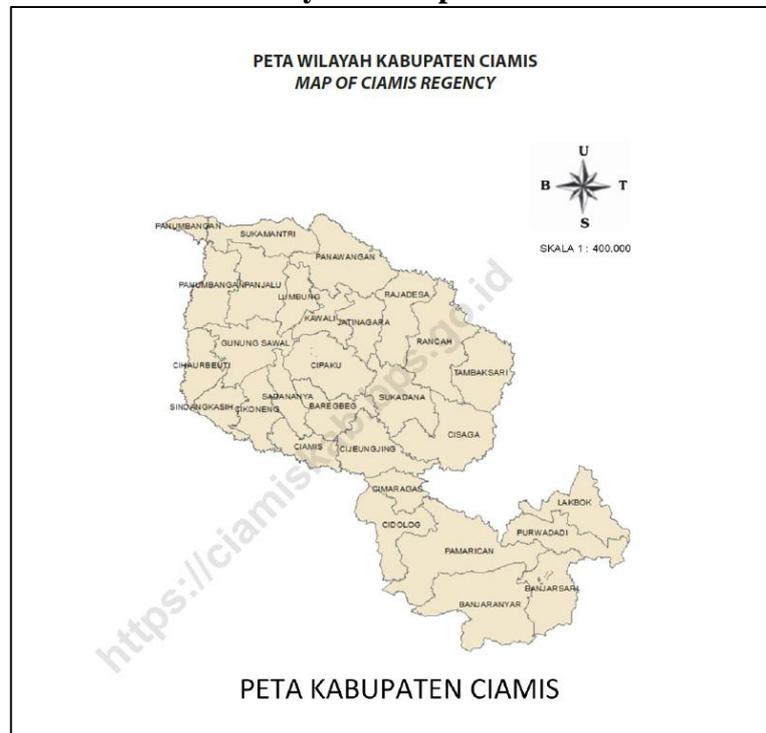
##### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara astronomis, Kabupaten Ciamis terletak antara 108°19' - 108°43' Bujur Timur dan 7o40'30" - 7o41'30" Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Ciamis memiliki batas-batas diantaranya:

- Utara – Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
- Barat - Kabupaten Tasikmalaya & Kota Tasikmalaya;
- Selatan – Kabupaten Pangandaran
- Timur – Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap.

Luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah 1.597,67 km<sup>2</sup>. Berdasarkan perhitungan garis lurus, jarak Kabupaten Ciamis dengan ibukota Provinsi Jawa Barat yakni Kota Bandung adalah 124 km. Kota yang paling dekat dengan Kabupaten Ciamis adalah Kota Tasikmalaya dengan jarak 17,5 km. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Ciamis terbagi menjadi 27 kecamatan, 265 Desa/Kelurahan (BPS Kabupaten Ciamis, 2022a).

**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Ciamis**



Sumber : (BPS Kabupaten Ciamis, 2022b)

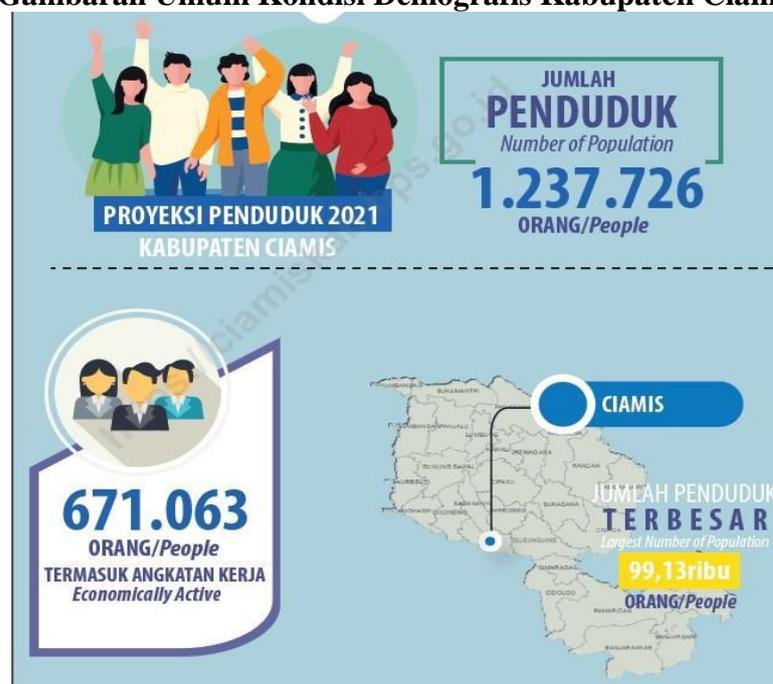
**Gambar 4.2**  
**Gambaran Umum Kondisi Geografis Kabupaten Ciamis**



Sumber : (BPS Kabupaten Ciamis, 2022a)

#### 4.1.2 Kondisi Demografis

**Gambar 4.3**  
**Gambaran Umum Kondisi Demografis Kabupaten Ciamis**



Sumber : (BPS Kabupaten Ciamis, 2022a)

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis sebanyak 1.237,73 ribu jiwa. Terdiri dari 619,66 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 618,07 ribu jiwa penduduk perempuan, sehingga angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Ciamis sebesar 100,26 yang artinya terdapat 100-101 penduduk laki-laki di setiap 100 penduduk perempuan.

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Cikoneng memiliki rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu 104,05, sedangkan yang terendah Kecamatan Tambaksari yaitu 95,45. Sebagian besar kecamatan memiliki angka rasio jenis kelamin lebih lebih dari 100, yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi, kecuali di sebelas kecamatan yakni Kecamatan Tambaksari, Pamarican, Cimaragas,

Cijeungjing, Cisaga, Rancah, Sukadana Ciamis, Jatinagara, Panawangan dan Lumbung.

Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Ciamis yang dihuni sebanyak 99,13 ribu jiwa (8,01 persen). Sementara itu, kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Cimaragas yang memiliki 16,13 ribu penduduk. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Hanya 8 kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk lebih dari 1.000 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS Kabupaten Ciamis, 2022a).

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut Tahun 2019**

Kabupaten	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya
Ciamis	1531284	31484	397	10	3730	61

Sumber : (BPS Provinsi Jawa Barat, 2021)

#### 4.1.3 Kondisi Sosio-Religi

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Mesjid, Langgar, Mushola dan Gereja di Kabupaten Ciamis Tahun 2018**

No	Kecamatan	Mesjid	Langgar	Mushola	Gereja
	Banjarsari	253	-	193	-
	Banjaranyar	-	-	-	-
	Lakbok	66	-	63	-
	Purwadadi	86	-	62	-
	Pamarican	151	-	244	-
	Cidolog	48	-	37	-
	Cimaragas	35	-	106	-
	Cijeungjing	149	-	326	-
	Cisaga	86	-	144	1
	Tambaksari	45	-	67	-
	Rancah	99	-	373	-
	Rajadesa	86	-	292	-
	Sukadana	74	-	86	-
	Ciamis	150	-	83	3
	Baregbeg	84	-	192	-

No	Kecamatan	Mesjid	Langgar	Mushola	Gereja
	Cikoneng	119	-	158	-
	Sindangkasih	77	-	55	-
	Cihaurbeuti	79	-	336	-
	Sadananya	64	-	129	-
	Cipaku	144	-	79	-
	Jatinagara	98	-	49	-
	Panawangan	119	-	324	1
	Kawali	17	-	200	-
	Lumbung	64	-	232	-
	Panjalu	102	-	115	-
	Sukamantri	39	-	57	-
	Panumbangan	99	-	144	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2433</b>	<b>-</b>	<b>4145</b>	<b>-</b>

Sumber : (BPS Kabupaten Ciamis, 2019)

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Pondok Pesantren Berdasarkan Kabupaten/Kota**  
**di Jawa Barat Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kabupaten Tasikmalaya	1344
2	Kabupaten Bogor	1093
3	Kabupaten Garut	1055
4	Kabupaten Cirebon	726
5	Kabupaten Sukabumi	692
6	Kabupaten Bandung Barat	475
7	Kabupaten Karawang	470
8	Kabupaten Ciamis	440
9	Kabupaten Cianjur	353
10	Kabupaten Majalengka	260
11	Kabupaten Sumedang	245
12	Kota Tasikmalaya	243
13	Kabupaten Bekasi	204
14	Kabupaten Purwakarta	202
15	Kota Bogor	149
16	Kabupaten Pangandaran	138
17	Kabupaten Bandung	135
18	Kota Sukabumi	96
19	Kota Bandung	92
20	Kabupaten Indramayu	69
21	Kota Depok	51
22	Kabupaten Subang	42
23	Kota Cirebon	41

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
24	Kota Banjar	40
25	Kabupaten Kuningan	33
26	Kota Cimahi	30
27	Kota Bekasi	10

Sumber : (Setda Provinsi Jawa Barat, 2020)

#### 4.1.4 Pemerintahan

##### A. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Ciamis**  
**Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PDIP	9	-	9
PKS	6	1	7
Gerindra	6	1	7
Demokrat	4	2	6
PAN	7	-	7
PPP	5	-	5
Golkar	5	-	5
PKB	3	1	4
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>50</b>

Sumber : (BPS Kabupaten Ciamis, 2022b)

##### B. Komposisi Keanggotaan DPRD Hasil Pemilu

**Tabel 4.5**  
**Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Hasil Pemilu 2009-2019**

Partai Politik	2009		2014		2019	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
PDIP	11	-	12	-	9	-
PKS	5	-	3	2	5	2
Gerindra	1	-	4	-	6	1
Demokrat	7	2	2	2	4	2
PAN	3	-	5	-	5	-
PPP	5	-	4	-	5	-
Golkar	7	1	5	1	5	-
PKB	3	1	4	-	3	1
PBB	2	-	1	-	1	-
Hanura	2	-	2	-	-	-
Nasdem	-	-	3	-	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>6</b>

Sumber : (BPS Kabupaten Ciamis, 2022b)

### C. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Ciamis menurut Tingkat

#### Pendidikan

**Tabel 4.6**  
**Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Ciamis**  
**Menurut Tingkat Pendidikan, 1999-2019**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>1999</b>	<b>2004</b>	<b>2009</b>	<b>2014</b>	<b>2019</b>
Sekolah Dasar	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-
SMA	-	-	22	22	15
Diploma I/II/III	-	-	3	3	1
Diploma IV/Sarjana	-	-	17	17	25
S2	-	-	8	8	9
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

Sumber : (BPS Kabupaten Ciamis, 2022b)

#### 4.2 Gambaran Umum Daerah Pemilihan (Dapil) 1

Berdasarkan penjelasan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pada Pemilu tahun 2019, wilayah Kabupaten Ciamis terbagi menjadi 6 Dapil berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018

Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun rincian setiap dapil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.7**  
**Pembagian Dapil Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019**

No	Daerah Pemilihan (Dapil)	Wilayah Kecamatan
1	Ciamis 1	Ciamis, Cikoneng, Sadananya, Sindangkasih
2	Ciamis 2	Cihaurbeuti, Panumbangan, Panjalu, Sukamantri
3	Ciamis 3	Kawali, Panawangan, Cipaku, Jatinagara, Lumbung
4	Ciamis 4	Rajadesa, Sukadana, Rancah, Tambaksari, Cisaga
5	Ciamis 5	Lakbok, Banjarsari, Purwadadi, Banjaranyar
6	Ciamis 6	Cijeungjing, Cidolog, Pamarican, Cimaragas, Baregbeg

Sumber : (Keputusan KPU RI Nomor 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018)

#### 4.2.1 Luas Wilayah

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Ciamis dalam laporan berjudul “Kabupaten Ciamis Dalam Angka 2022” Luas wilayah berdasarkan kecamatan di Dapil 1 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Untuk Dapil 1**

No	Nama Kecamatan	Luas Daerah/Wilayah
1	Ciamis	33,85 Km <sup>2</sup>
2	Cikoneng	47,22 Km <sup>2</sup>
3	Sadananya	46,24 Km <sup>2</sup>
4	Sindangkasih	29,79 Km <sup>2</sup>

Sumber : (BPS Kabupaten Ciamis, 2022b)

#### 4.2.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Ciamis dalam laporan berjudul “Kabupaten Ciamis Dalam Angka 2022” jumlah penduduk wilayah Kecamatan Ciamis, Cikoneng, Sadananya dan Sindangkasih berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Jumlah Penduduk Wilayah Dapil 1 Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Ciamis	54.734	55.105	109.839
2	Cikoneng	32.018	30.583	62.601
3	Sadananya	22.128	21.627	43.755
4	Sindangkasih	30.170	28.810	58.980

Sumber : (BPS Kabupaten Ciamis, 2022b)

#### 4.2.3 Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Ciamis, Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Berdasarkan Jumlah DPT, DPTb dan DPK dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.10**  
**Data Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Wilayah Dapil 1**

Uraian		Ciamis	Cikoneng	Sadananya	Sindangkasih	Jumlah Akhir	
A	Data Pemilih						
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	35.192	21.463	13.976	18.504	89.135
		PR	36.506	20.552	13.803	17.968	88.829
		JML	71.698	42.015	27.779	36.472	177.964
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTb	LK	784	99	39	86	1.008
		PR	401	134	32	88	655
		JML	1.185	233	71	174	1.663
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	341	151	88	144	724
		PR	386	182	99	146	813
		JML	727	333	187	290	1537
Jumlah Pemilih	LK	36.317	21.713	14.103	18.734	90.867	
	PR	37.293	20.868	13.934	18.202	90.297	

Uraian		Ciamis	Cikoneng	Sadananya	Sindangkasih	Jumlah Akhir
	JML	73.610	42.581	28.037	36.936	181.164
<b>B</b>	<b>Pengguna Hak Pilih</b>					
1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	LK	29.579	15.811	10.874	13.927	70.191
	PR	32.350	17.254	12.011	15.494	77.109
	JML	61.929	33.065	22.885	29.421	147.300
2. Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	LK	110	12	6	23	151
	PR	99	10	11	31	151
	JML	209	22	17	54	302
3. Pengguna Hak Pilih dalam DPK	LK	341	147	88	144	720
	PR	383	175	99	146	803
	JML	724	322	187	290	1.523
Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	30.030	15.970	10.968	14.094	71.062
	PR	32.832	17.439	12.121	15.671	78.063
	JML	62.862	33.409	23.089	29.765	149.125

Sumber : (Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 97/Pl.01.7-Kpt/3207/Kpu-Kab/V/2019)

### 4.3 Partai Gerindra

#### 4.3.1 Sejarah Partai Gerindra

Dikutip dari laman gerindra.id (28/8/2022) Sejarah lahirnya gagasan pembentukan Partai Gerindra diawali pada November 2007 dalam sebuah diskusi antara Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta yang membahas politik terkini, yang dianggap telah jauh dari nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Menurutnya demokrasi telah dibajak oleh orang-orang bermodal yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, rakyat hanyalah dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik. Menurutnya, jika hal tersebut dibiarkan maka negara akan dipimpin oleh para mafia dan siapapun yang tidak memiliki kekuatan ekonomi akan dengan mudah menjadi korban. Termasuk salah satunya adalah Hashim Djojohadikusumo sendiri yang pernah dipidanakan dengan tuduhan mencuri benda-benda purbakala di Museum Radya Pustaka, Solo, Jawa Tengah. Fadli zon kemudian mengutip kata-kata politisi Inggris abad ke-18

yakni Edmund Burke yang isinya “*The only thing necessary for the triumph [of evil] is for good men to do nothing*”. Dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut dapat diartikan sebagai berikut “kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak”. Terinspirasi dari kalimat tersebut, Hashim Djojohadikusumo kemudian setuju jika ada sebuah partai baru dengan haluan dan harapan baru yang bertujuan untuk menciptakan negara yang bisa dipimpin oleh manusia yang memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan golongan saja (Partai Gerindra, 2022).

Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan oleh orang-orang di lingkaran Hashim dan Prabowo. Gagasan tersebut tidak sepenuhnya diterima, ada pula pihak-pihak yang tidak setuju dengan gagasan tersebut. Beberapa pihak mengatakan lebih baik berjuang bersama partai yang telah ada, kebetulan pada waktu itu Prabowo Subianto juga merupakan anggota Dewan Penasehat Partai Golkar yang memiliki kemungkinan untuk maju menjadi Ketua Umum. Namun Fadli Zon skeptis pada pernyataan tersebut karena pada saat itu Ketua Umum Partai Golkar adalah Jusuf Kalla yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden. Menurutnya Jusuf Kalla tidak mungkin menyerahkan jabatan Ketua Partai kepada Prabowo. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya disepakati perlu adanya sebuah partai baru yang memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat.

Pada Desember 2007, kemudian diadakan sebuah perkumpulan di sebuah rumah yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir. Beberapa nama yang hadir diantaranya adalah Fadli Zon, Hashim Djojohadikusumo, Prabowo Subianto, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran

Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Haris Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardjanto, dan Prof Suhardi. Perkumpulan tersebut diadakan untuk membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Padatnya jadwal pembuatan AD/ART tersebut membuat fisik Fadli Zon menjadi kelelahan dan akhirnya ia harus dirawat di Rumah Sakit selama seminggu.

Meskipun Fadli Zon agak pesimis dengan kelanjutan pembentukan partai, Hashim Djojohadikusumo tetap meyakinkan Fadli Zon ketika ia menjenguk ke rumah sakit dan tetap antusias untuk mewujudkan gagasan tersebut. Pendirian partai akhirnya tetap dilanjutkan secara maraton, hingga akhirnya nama Gerindra Muncul dan menjadikan kepala Burung Garuda sebagai lambangnya. Nama Gerindra sendiri diciptakan oleh Hashim Djojohadikusumo sedangkan lambang kepala burung garuda diciptakan oleh Prabowo Subianto.

Deklarasi pendirian Partai Gerindra dilakukan pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi tersebut, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur, serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **4.3.2 Visi dan Misi**

Visi dan Misi Partai Gerindra sebagaimana dikutip dari laman resminya yakni gerindra.id (28/08/2022) adalah sebagai berikut:

**Visi**

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

**Misi**

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.

5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih di setiap tingkat pemerintahan.

### 4.3.3 Makna dan Lambang Partai

**Gambar 4.4**  
**Lambang Partai Gerindra**



Sumber : (Partai Gerindra, 2022)

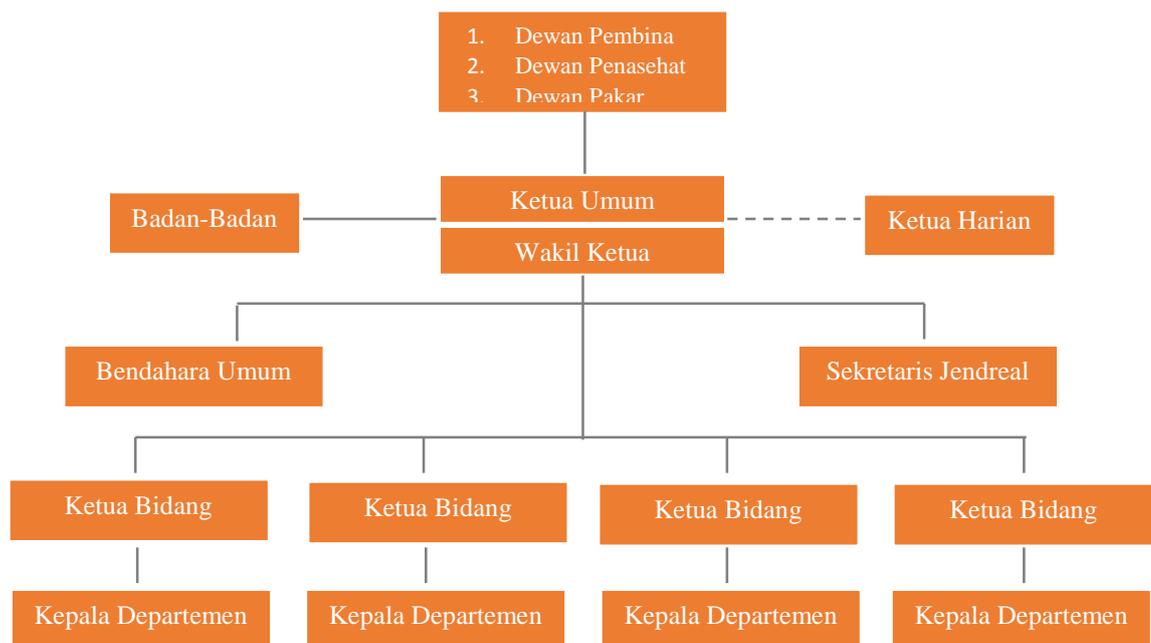
- Kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih, yang melambangkan kesucian dan keikhlasan. Di tengah terdapat lima persegi bergaris hitam dengan dasar merah.
- Di tengahnya terdapat gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran.
- Menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak.
- Kepala Burung Garuda pada lehernya terdapat sisik yang berjumlah 17, terdapat jengger dan jambul berjumlah 8, bulu telinga yang berjumlah 4,

bingkai gambar kepala Burung Garuda persegi 5, yang menyimbolkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-45.

- Di atasnya bertuliskan PARTAI berwarna hitam, di bawahnya bertuliskan GERINDRA berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, di bawahnya lagi tulisan GERAKAN INDONESIA RAYA berwarna hitam.

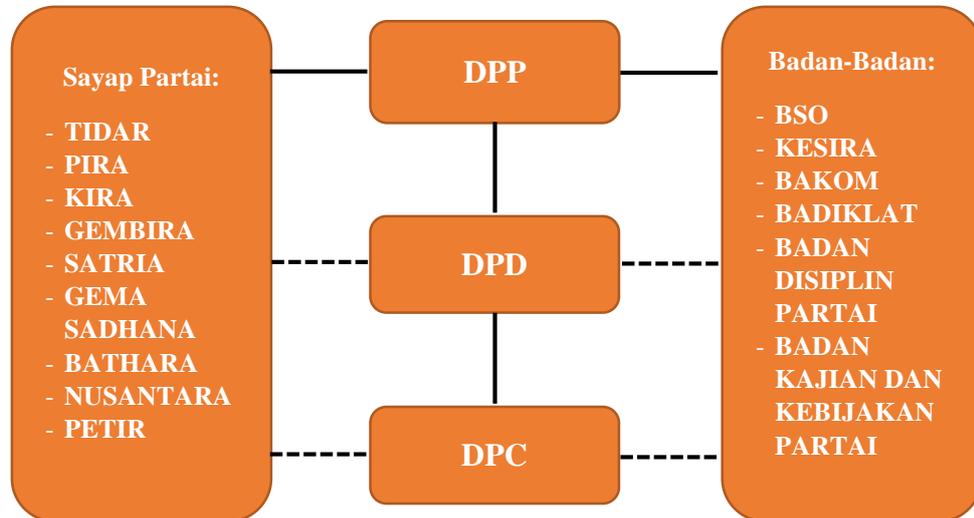
#### 4.3.4 Struktur Organisasi dan Keanggotaan Partai

**Gambar 4.5**  
**Struktur Organisasi DPP Partai Gerindra**



Sumber : (Partai Gerindra, 2022)

**Gambar 4.6**  
**Bagan Struktur Keorganisasian Partai Gerindra**



Sumber : (Partai Gerindra, 2022)

**Gambar 4.7**  
**Statistik Keanggotaan Partai Gerindra**



Sumber : (Partai Gerindra, 2022)

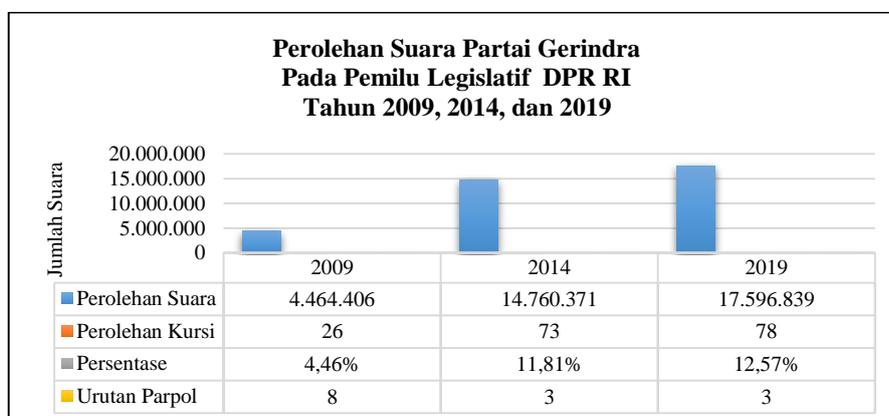
#### 4.3.5 Perolehan Suara dan Perolehan Kursi di DPR RI

Keikutsertaan Partai Gerindra dalam Pemilu diawali pada Pemilu tahun 2009. Partai Gerindra yang saat ini tergolong kedalam sebuah partai baru nyatanya mampu memperoleh suara yang cukup baik pada saat itu. Dimana pada Pemilu Legislatif di tingkat pusat tahun 2009, Partai Gerindra mampu memperoleh suara sebanyak 4.646.406 suara atau 4,46% dari jumlah suara sah dengan perolehan kursi sebanyak 26 kursi.

Peningkatan perolehan suara yang signifikan terjadi pada Pemilu 2014 dimana pada tahun tersebut perolehan suara Gerindra naik sekitar 68,5% dari Pemilu sebelumnya yakni 14.760.371 suara atau 11,81% dari jumlah suara sah dengan perolehan kursi sebanyak 73 kursi.

Selanjutnya pada Pemilu 2019 perolehan suara Partai Gerindra berada di angka 17.596.839 suara atau 12,57% dari jumlah suara sah dengan perolehan kursi sebanyak 78 kursi di DPR. Secara lebih jelas, peningkatan elektabilitas suara Gerindra dapat kita lihat pada grafik dibawah ini :

**Gambar 4.8**  
**Grafik Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2009, 2014, dan 2019**



Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2015; Kompas.com, 2019)

Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa pada setiap gelaran Pemilu di tingkat pusat terhitung mulai dari Pemilu 2009 perolehan suara dan perolehan kursi Partai Gerindra selalu mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa elektabilitas suara dalam setiap Pemilu terus mengalami peningkatan khususnya sejak Pemilu 2014.

#### **4.4 Partai Gerindra Kabupaten Ciamis**

##### **4.4.1 Gambaran Umum Partai Gerindra Kabupaten Ciamis**

###### **A. Struktur Organisasi, Sekretariat dan Keanggotaan**

Dikutip dari laman [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id) Struktur kepengurusan Partai Gerindra Kabupaten Ciamis berdasarkan keputusan kepengurusan partai nomor 04-0150/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 22 Maret 2022 adalah sebagai berikut, Ketua : Pipin Arif Apilin ; Sekretaris : Asep Halim Jamaludin ; Bendahara : H. Awan Setiawan SP.

Adapun jumlah keseluruhan pengurus ada 38 orang dengan jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 12 orang atau 31,58%. Kepengurusan partai di tingkat kecamatan tersebar di 27 kecamatan. Dikutip dari laman [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id) jumlah anggota Partai Gerindra Kabupaten Ciamis berjumlah 2012 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Keanggotaan Partai Gerindra Kabupaten Ciamis**

Kecamatan	Jumlah Anggota	Kecamatan	Jumlah Anggota
Banjaranyar	13	Lumbung	43
Banjarsari	374	Pamarican	59
Baregbeg	38	Panawangan	30
Ciamis	337	Panjalu	34
Cidolog	3	Panumbangan	99
Cihaurbeuti	48	Purwadadi	6

Kecamatan	Jumlah Anggota	Kecamatan	Jumlah Anggota
Cijeungjing	95	Rajadesa	13
Cikoneng	47	Rancah	83
Cimaragas	4	Sadananya	238
Cipaku	83	Sindangkasih	27
Cisaga	66	Sukadana	5
Jatinagara	3	Sukamantri	190
Kawali	26	Tambaksari	36
Lakbok	12		

Sumber : (KPU RI, 2023)

### **B. Perolehan Suara dan Perolehan Kursi di DPRD Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan data Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif Kabupaten Ciamis oleh KPU Kabupaten Ciamis, pada Pemilu legislatif tahun 2009 Partai Gerindra mendapatkan perolehan suara sebanyak 30.256 suara atau sebesar 3,68% dari total suara sah dan menempati urutan ke-10 dari 38 partai politik peserta Pemilu serta berhasil menempati 1 dari 50 kursi di DPRD Kabupaten Ciamis.

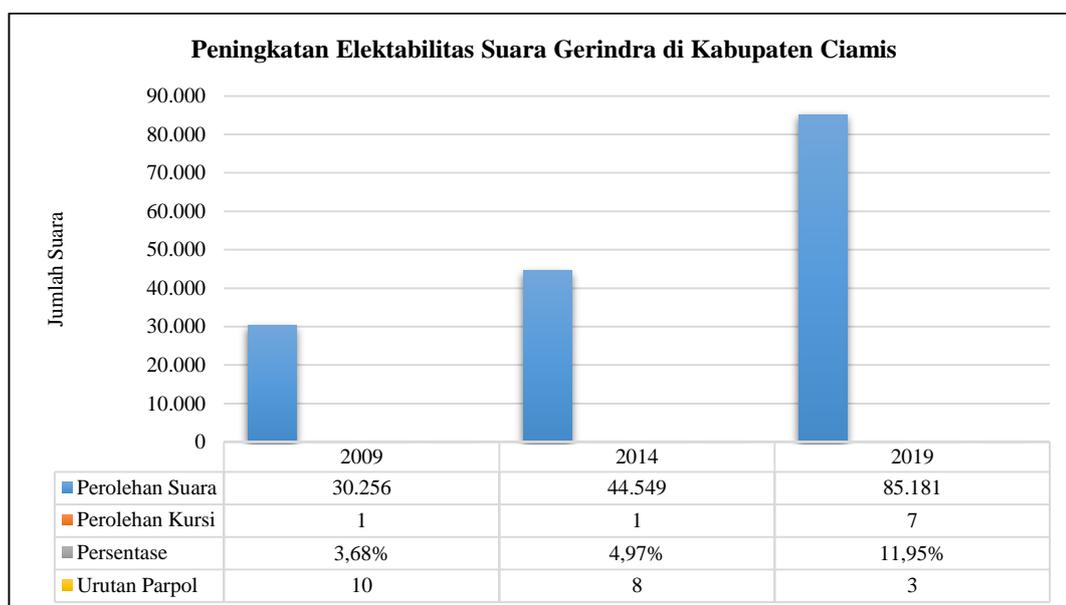
Selanjutnya pada Pemilu legislatif tahun 2014, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Ciamis yang diuraikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Ciamis yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Ciamis, Partai Gerindra memperoleh suara sebanyak 44.549 suara atau sebesar 4,97% dari jumlah suara sah, menempati urutan ke-8 dari 15 partai peserta Pemilu serta dapat menduduki 1 kursi di DPRD Kabupaten Ciamis.

Kemudian, pada Pemilu serentak tahun 2019, perolehan suara Partai Gerindra mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis nomor: 97/Pl.01.7-Kpt/3207/Kpu-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019, Partai Gerindra berhasil mendapatkan perolehan suara sebanyak 85.181 suara dan berhasil menempati urutan ke-3 di bawah PDIP dan PKS serta berhasil menduduki 7 kursi di DPRD Kabupaten Ciamis.

Secara lebih jelas peningkatan elektabilitas suara Partai Gerindra di Kabupaten Ciamis dapat kita lihat pada grafik di bawah ini :

**Gambar 4.9**  
**Grafik Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Gerindra**  
**Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2009, 2014 dan 2019**



Sumber : (Diolah dari data KPU Kabupaten Ciamis, 2009, 2014, 2019b)

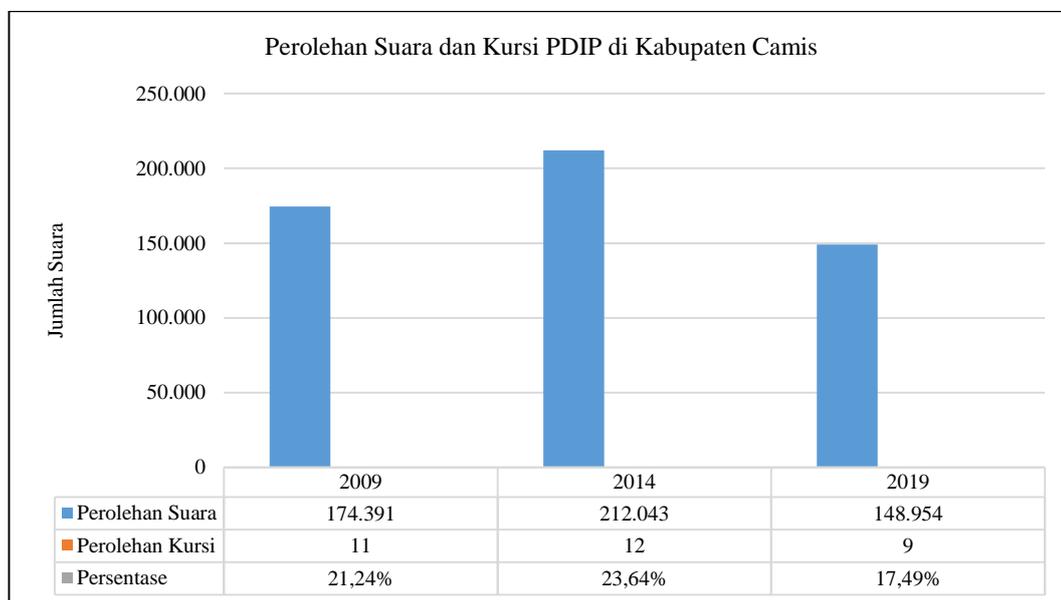
Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa elektabilitas suara Gerindra naik signifikan pada Pemilu 2019 dilihat dari perolehan suara dan perolehan kursi dan juga urutan parpol pemenang Pemilu.

#### 4.4.2 Perubahan Peta Kekuatan Politik Pasca Pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis

Peningkatan perolehan suara dan perolehan kursi Partai Gerindra pada Pemilu 2019 telah mengantarkan Partai Gerindra sebagai kekuatan politik baru bersama PKS dan cukup mengikis dominasi PDIP sebagai partai pemenang dalam setiap Pemilu di Kabupaten Ciamis.

Meskipun secara statistik, PDIP masih mendominasi dengan perolehan suara dan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Ciamis, namun jika dibandingkan dengan Pemilu tahun sebelumnya PDIP mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat kita lihat pada grafik dibawah ini :

**Gambar 4.10**  
**Grafik Perolehan Suara dan Kursi PDIP pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2009, 2014 dan 2019**



Sumber : (Diolah dari data KPU Kabupaten Ciamis, 2009, 2014, 2019b)

Dapat kita lihat pada grafik diatas, perolehan suara PDIP mengalami penurunan yang sangat signifikan pada Pemilu 2019 dengan penurunan sekitar 63

ribu suara. Perolehan kursi pun mengalami penurunan sebanyak 3 kursi dibanding Pemilu sebelumnya.

Selain PDIP, PAN dan Golkar juga mengalami penurunan cukup signifikan dimana pada Pemilu 2014 PAN mendapatkan perolehan suara sebanyak 114.808 atau 12,8% dari jumlah suara sah dan memperoleh 7 kursi di DPRD Ciamis dengan urutan kedua di bawah PDIP. sedangkan pada Pemilu 2019 PAN hanya mendapatkan 83.824 suara atau 11,69% dan menempati 5 kursi di DPRD Kabupaten Ciamis. Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 111.398 atau 12,42% dari jumlah suara sah, menempati 7 kursi di DPRD Ciamis dan berada di urutan ke 3 di bawah PDIP dan PAN. Sedangkan pada Pemilu 2019, Golkar hanya mendapatkan perolehan suara sebanyak 60.018 atau sekitar 8,42% dari jumlah suara sah dan menempati 5 kursi di DPRD Ciamis.<sup>8</sup>

Dengan hasil tersebut, Partai Gerindra kemudian muncul sebagai kekuatan politik baru di Kabupaten Ciamis dan merangkak naik mendampingi PDIP sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Ciamis Periode 2019-2024 bersama PKS dan Demokrat. Hal ini tentu memberikan perubahan dan warna baru terhadap peta kekuatan politik di Kabupaten Ciamis.

Dominasi PDIP di DPRD Ciamis kemungkinan akan mampu diredam oleh Gerindra dan PKS mengingat dua partai tersebut memiliki kedekatan yang cukup baik. Seperti diungkapkan oleh Ketua DPC PKS Kabupaten Ciamis, Arif Anwar Budiman yang dikutip dari laman galuh.id : “PKS dengan Gerindra bersama bukan

---

<sup>8</sup> Lihat Lampiran VII Dokumentasi Pendukung Pra Penelitian

yang baru. Saya ingat ketika Prabowo hadir ke Ciamis. Bahwa kita ini bukan hanya sekutu, tapi segajah. Karena kita besar,” (Nurdiana, 2021).

Selain itu Ketua DPC Gerindra Kabupaten Ciamis Bapak Pipin Arif Apilin juga mengungkapkan : “Kita teman lama. Kita sama-sama berjuang dalam berbagai perhelatan. Di tingkat Gubernur maupun Nasional, Walaupun mereka belakangan masuk di pemerintahan, kita harapannya tetap bisa bersama dengan PKS,” (Nurdiana, 2021).

Seperti kita ketahui, PKS dan Gerindra merupakan partai pengusung Capres dan Cawapres Prabowo dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 dan juga pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Herdiat Sunarya dan Yana D Putra pada Pilkada 2018. Dengan kuatnya kedekatan Gerindra dan PKS serta kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Ciamis, keduanya akan menjadi kekuatan politik yang cukup besar untuk mampu mengeliminasi dominasi PDIP meskipun menyandang status sebagai partai pemenang Pemilu di Kabupaten Ciamis.

Kemudian, dilihat dari perolehan suara terdapat peralihan konstituen di beberapa kecamatan. Secara lebih jelas perubahan peta kekuatan politik Kabupaten Ciamis pada Pemilu Legislatif 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.12**  
**Analisis Peta Kekuatan Politik Kabupaten Ciamis Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019**

Kecamatan	PARTAI POLITIK															
	PKB				PDIP				Gerindra				Golkar			
	2014	2019	Suara	%	2014	2019	Suara	%	2014	2019	Suara	%	2014	2019	Suara	%
Ciamis	2888	2286	-602 ▼	20,8	6689	7646	957 ▲	12,5	5567	12874	7.307 ▲	56,8	11867	4741	-7.126 ▼	60
Cikoneng	778	1690	912 ▲	54	11007	6036	-4.971 ▼	45,2	624	2633	2.009 ▲	76,3	1590	731	-859 ▼	54
Sadananya	319	545	226 ▲	41,5	13028	3626	-9.402 ▼	72,2	263	2520	2.257 ▲	89,6	968	790	-178 ▼	18,4
Sindangkasih	1192	2003	811 ▲	40,5	8591	8830	239 ▲	2,7	1688	4264	2.576 ▲	60,4	2383	1042	-1.341 ▼	56,3
Cihaurbeuti	3744	3838	94 ▲	2,4	4172	2634	-1.538 ▼	36,9	925	3012	2.087 ▲	69,3	3365	5111	1.746 ▲	34,2
Panumbangan	1154	1147	-7 ▼	0,6	11057	5890	-5.167 ▼	46,7	921	5705	4.784 ▲	83,9	3514	3212	-302 ▼	8,6
Panjalu	1439	955	-484 ▼	33,6	2016	3089	1.073 ▲	34,7	629	2938	2.309 ▲	78,6	3422	1129	-2.293 ▼	67
Sukamantri	411	531	120 ▲	22,6	1284	1937	653 ▲	33,7	1788	2719	931 ▲	34,2	462	459	-3 ▼	0,6
Kawalil	3481	2922	-559 ▼	16,1	4188	3978	-210 ▼	5	795	3340	2.545 ▲	76,2	2759	2046	-713 ▼	25,8
Panawangan	2598	1272	-1.326 ▼	51	5719	4876	-843 ▼	14,7	998	2480	1.482 ▲	59,8	1490	2738	1.248 ▲	45,6
Cipaku	1237	1484	247 ▲	16,6	12457	7898	-4.559 ▼	36,6	956	3976	3.020 ▲	76	2013	950	-1.063 ▼	52,8
Jatinagara	2116	1265	-851 ▼	40,2	1628	1419	-209 ▼	12,8	308	1661	1.353 ▲	81,5	517	796	279 ▲	35,1
Lumbung	2786	2288	-498 ▼	17,9	1737	1727	-10 ▼	0,6	746	1126	380 ▲	33,7	2843	599	-2.244 ▼	78,9
Rajadesa	5721	2444	-3.277 ▼	57,3	2831	2513	-318 ▼	11,2	1187	2435	1.248 ▲	51,3	870	2541	1.671 ▲	65,8
Sukadana	394	859	465 ▲	54,1	4436	1007	-3.429 ▼	77,3	343	1038	695 ▲	67	3196	5565	2.369 ▲	42,6
Rancah	3322	1596	-1.726 ▼	52	7774	6993	-781 ▼	10	4059	3557	-502 ▼	12,4	2539	4439	1.900 ▲	42,8
Tambaksari	1216	8111	6.895 ▲	85	6319	5892	-427 ▼	6,8	484	1984	1.500 ▲	75,6	2067	1772	-295 ▼	14,3
Cisaga	1527	1338	-189 ▼	12,4	3780	2487	-1.293 ▼	34,2	1152	2468	1.316 ▲	53,3	2812	2994	182 ▲	6,1
Lakbok	1367	2028	661 ▲	32,6	6940	5500	-1.440 ▼	20,7	927	1419	492 ▲	34,7	1985	3911	1.926 ▲	49,2
Banjarsari	4417	3715	-702 ▼	15,9	13844	5975	-7.869 ▼	56,8	2514	3950	1.436 ▲	36,4	8904	3624	-5.280 ▼	59,3
Purwadadi	2077	1340	-737 ▼	35,5	4795	3655	-1.140 ▼	23,8	861	1260	399 ▲	31,7	1193	2210	1.017 ▲	46
Banjaranyar		1807	1.807 ▲	100		7275	7.275 ▲	100		2204	2.204 ▲	100		1639	1.639 ▲	100
Cijeungjing	1496	1921	425 ▲	22,1	5558	3277	-2.281 ▼	41	1371	5355	3.984 ▲	74,4	7629	2323	-5.306 ▼	69,6
Cidolog	602	837	235 ▲	28,1	1768	2559	791 ▲	30,9	453	1128	675 ▲	59,8	1337	631	-706 ▼	52,8
Pamarican	4423	4142	-281 ▼	6,4	10615	8202	-2.413 ▼	22,7	3645	5428	1.783 ▲	32,8	1791	1433	-358 ▼	20
Cimaragas	202	413	211 ▲	51,1	3550	3164	-386 ▼	10,9	312	711	399 ▲	56,1	901	430	-471 ▼	52,3
Baregbeg	1692	3477	1.785 ▲	51,3	6550	6517	-33 ▼	0,5	1228	2996	1.768 ▲	59	4324	2162	-2.162 ▼	50

Kecamatan	PARTAI POLITIK															
	PKS				PAN				Demokrat				PPP			
	2014	2019	Suara	%	2014	2019	Suara	%	2014	2019	Suara	%	2014	2019	Suara	%
Ciamis	4081	6988	2.907▲	41,6	7760	8964	1.204▲	13,4	5083	7217	2.134▲	29,6	2883	2266	-617▼	21,4
Cikoneng	1560	8743	7.183▲	82,2	1244	1590	346▲	21,8	1546	1114	-432▼	27,9	7899	6500	-1.399▼	17,7
Sadananya	1565	2971	1.406▲	47,3	1494	1654	160▲	9,7	455	2046	1.591▲	77,8	2056	5570	3.514▲	63,1
Sindangkasih	2324	4361	2.037▲	46,7	1450	1986	536▲	27	2220	1011	-1.209▼	54,5	4329	2836	-1.493▼	34,5
Cihaurbeuti	4845	5871	1.026▲	17,5	3420	2117	-1.303▼	38,1	1799	892	-907▼	50,4	2721	1516	-1.205▼	44,3
Panumbangan	3842	6168	2.326▲	37,7	3211	934	-2.277▼	70,9	4032	4766	734▲	15,4	1327	2218	891▲	40,2
Panjalu	3846	6443	2.597▲	40,3	1241	2206	965▲	43,7	1162	832	-330▼	28,4	4505	3501	-1.004▼	22,3
Sukamantri	878	1256	378▲	30,1	377	336	-41▼	10,9	263	241	-22▼	8,4	3980	3375	-605▼	15,2
Kawalil	1286	1896	610▲	32,2	3433	6686	3.253▲	48,7	1383	1264	-119▼	8,6	2203	777	-1.426▼	64,7
Panawangan	4256	5285	1.029▲	19,5	2234	8399	6.165▲	73,4	4482	849	-3.633▼	81,1	314	693	379▲	54,7
Cipaku	3018	7389	4.371▲	59,2	3573	6078	2.505▲	41,2	878	2518	1.640▲	65,1	8335	4894	-3.441▼	41,3
Jatinagara	3789	2998	-791▼	20,9	490	2360	1.870▲	79,2	1282	447	-835▼	65,1	548	437	-111▼	-25,4
Lumbung	2482	2880	398▲	13,8	2298	5223	2.925▲	56	1074	2473	1.399▲	56,6	862	213	-649▼	75,3
Rajadesa	7413	6375	-1.038▼	14	909	1487	578▲	38,9	4392	2989	-1.403▼	31,9	1394	2338	944▲	40,4
Sukadana	1990	1493	-497▼	25	410	567	157▲	27,7	2176	605	-1.571▼	72,2	728	673	-55▼	7,6
Rancah	4975	6208	1.233▲	19,9	2095	499	-1.596▼	76,2	1559	2493	934▲	37,5	2050	2679	629▲	23,5
Tambaksari	1418	1197	-221▼	15,6	396	128	-268▼	67,7	285	403	118▲	29,3	126	187	61▲	32,6
Cisaga	2047	1370	-677▼	33,1	6407	7537	1.130▲	15	2739	783	-1.956▼	71,4	449	378	-71▼	15,8
Lakbok	1106	1336	230▲	17,2	7993	5443	-2.550▼	31,9	2624	1353	-1.271▼	48,4	1585	2079	494▲	23,8
Banjarsari	7606	6651	-955▼	12,6	5734	4939	-795▼	13,9	3440	1471	-1.969▼	57,2	4331	3701	-630▼	14,5
Purwadadi	1693	1231	-462▼	27,3	2867	3262	395▲	12,1	4768	4857	89▲	1,8	686	1522	836▲	54,9
Banjaranyar		2997	2.997▲	100		3445	3.445▲	100		452	452▲	100		1872	1.872▲	100,0
Cijeungjing	2900	4813	1.913▲	39,7	2305	3695	1.390▲	37,6	2620	2564	-56▼	2,1	1185	607	-578▼	48,8
Cidolog	2312	390	-1.922▼	83,1	1102	1092	-10▼	0,9	1774	1425	-349▼	19,7	675	569	-106▼	15,7
Pamarican	2958	2215	-743▼	25,1	1114	1000	-114▼	10,2	1677	1503	-174▼	10,4	2627	6098	3.471▲	56,9
Cimaragas	529	806	277▲	34,4	225	511	286▲	56	3205	2030	-1.175▼	36,7	146	139	-7▼	4,8
Baregbeg	3135	6016	2.881▲	47,9	1932	1146	-786▼	40,7	1778	867	-911▼	51,2	1803	548	-1.255▼	69,6

Sumber : (Diolah dari data KPU Kabupaten Ciamis, 2019a)

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa PDI Perjuangan mengalami penurunan perolehan suara di 21 Kecamatan atau 77% dari jumlah Kecamatan di Kabupaten Ciamis pada Pemilu 2019. Penurunan yang signifikan terjadi di 5 Kecamatan dengan penurunan suara diatas 45% yakni di Kecamatan Cikoneng sebesar 45,2%, Kecamatan Sadananya 72,2%, Kecamatan Panumbangan 46,7%, Kecamatan Sukadana 77,3%, dan Kecamatan Banjarsari 56,8%. Sedangkan, Partai Gerindra mengalami peningkatan perolehan suara di 26 Kecamatan atau 96% dari Jumlah kecamatan. Peningkatan yang signifikan terjadi di 20 Kecamatan dengan peningkatan perolehan suara diatas 50%.

Perubahan peta kekuatan politik terjadi di beberapa kecamatan diantaranya, *pertama*, di Kecamatan Ciamis dimana Golkar sebagai partai yang mendominasi dengan perolehan suara terbanyak pada 2014 mengalami penurunan sebesar 60% dan Partai Gerindra mengalami kenaikan sebesar 56,8% pada 2019. *Kedua*, di Kecamatan Cikoneng dimana PDIP mengalami penurunan suara sebesar 45,2% pada 2019 dan Partai Gerindra serta PKS mengalami kenaikan masing-masing 82,2% dan 76,3%. *Ketiga*, di Kecamatan Sadananya dimana PDI Perjuangan mengalami penurunan suara sebesar 72,2% sedangkan Gerindra, Demokrat dan PPP mengalami peningkatan perolehan suara diatas 60%. *Keempat*, di Kecamatan Panumbangan dimana PDIP mengalami penurunan sebanyak 5.167 suara pada 2019 sedangkan Gerindra mengalami kenaikan sebanyak 4,784 suara atau 83,9% dari Pemilu sebelumnya. *Kelima*, di Kecamatan Kawali dimana Partai Gerindra mengalami kenaikan sebanyak 2,406 suara atau 76,2% dibanding Pemilu sebelumnya. Kemudian PAN juga mengalami kenaikan sebanyak 3,253 suara atau

naik 48,7% dari Pemilu sebelumnya. *Keenam*, di Kecamatan Panawangan dimana Perolehan suara Demokrat menurun drastis sebesar 81,1% sedangkan PAN meningkat sebesar 73,4% dibanding Pemilu sebelumnya.

#### **4.4.3 Tantangan Partai Gerindra Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait, Partai Gerindra menghadapi beberapa tantangan pada Pemilu 2019 khususnya di Dapil 1 itu cukup bervariasi akan tetapi merujuk pada satu aspek yang sama yaitu persaingan politik dengan partai lain, sentimen kedaerahan serta tantangan untuk meningkatkan perolehan kursi. Di tingkat DPC tantangan utamanya lebih kepada bagaimana cara untuk meningkatkan perolehan kursi Pemilu 2019 sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Asep Halim Jamaludin dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa :

“Dulu 2019 tantangannya gini, yang pertama harus penambahan kursi. Dulu sejarahnya, waktu pertama berdiri Partai Gerindra itu baru mendapatkan 1 kursi di 2009, kemudian pada 2014 nambah kursi menjadi 4. Nahh tantangan waktu itu adalah penambahan kursi. Otomatis untuk mendapatkan kursi itu harus ada strategi ya. Diterapkan di masyarakat, salah satunya yang tadi itu, bahwa tantangannya bagaimana caranya supaya Gerindra itu lebih diketahui oleh masyarakat luas Kabupaten Ciamis. sebetulnya kalau tantangan itu banyak partai lain kan ya yang lebih awal berdiri di ciamis itu bukan hanya Gerindra saja yang sudah lama-lama sehingga bagaimana caranya kita bisa merebut simpati masyarakat untuk meningkatkan elektabilitas partai, popularitas partai sehingga pasti berdampak pada perolehan suara Gerindra itu sendiri. Tantangannya itu tadi saya sampaikan, banyak partai pesaing, kemudian bagaimana caranya mengenalkan terhadap masyarakat, sementara kan masyarakat belum tau semuanya kan ya ke Partai Gerindra pada saat itu, awalnya. Tapi makin kesini kan makin dikenal. Nah kalau tantangan yang lain, saya rasa gak begitu ini gitu. Karena masing-masing partai kan punya tujuan meningkatkan perolehan kursi suara masing-masing ya di wilayah. Itu barangkali gambaran ringkasannya. Lebih ke banyak partai juga. Jadi tantangannya itu partai lain pun sama pasti untuk memperoleh kursi. Kemudian yang tadi yang kedua, berarti harus benar-benar sampai ke *grassroot* / ke masyarakat itu mengenalkan perlu proses.”  
(Asep Halim Jamaludin, 14 Oktober 2022)

Di tingkat PAC tantangan yang dihadapi lebih kepada dominasi partai pesaing yang cukup kuat serta sentimen kedaerahan yang masih kental seperti yang diungkapkan oleh Bapak Enung Ruhimat dan Bapak Wawan Hanurawan dibawah ini :

“Di Sindangkasih itu tantangannya pertama, banyak daerah-daerah yang dominan merah (PDIP) contohnya Sukamanah, terus di daerah saya disini Sukaraja, terus Budiharja, Budiasih, Sukaresik, Wanasigra. Ada juga yang dominan hijau. Itu Gunungcupu dan Sukasenang. Terus yang kedua, dari Sindangkasih itu ada 9 calon yang maju pada pemilihan legislatif kemarin. Belum lagi yang dari Cikoneng, ada pak Uus dari PKS dan pak Toni dari PPP. Itu jadi tantangan berat buat Sindangkasih. Apalagi program dari dewan untuk Sindangkasih itu nggak ada jadi apa yang mau dibanggakan. Kemarin juga banyak bantuan dari Pak Jokowi yang dimanfaatkan oleh calon-calon dari PDIP.” (Enung Ruhimat, 19 Oktober 2022)

“Seperti kita ketahui untuk wilayah Kecamatan Sadananya itu kan basis merah, disini ya tantangan bagi saya sebagai ketua PAC untuk mengembangkan kantong-kantong suara Gerindra di wilayah tersebut. yaa kita bagaimana caranya asal bisa melobi ke masyarakat bisa sosialisasi yang bisa dimengerti dan dipahami oleh akal mereka.” (Wawan Hanurawan, 14 Oktober 2022)

Dari ketiga pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa tantangan utama di Dapil 1 adalah masih kuatnya dominasi PDIP sebagai partai pesaing yang sudah memiliki basis pemilih yang mengakar di masyarakat sejak Pemilu-Pemilu sebelumnya serta kuatnya sentimen kedaerahan dimana calon-calon dari putra daerah itu lebih mendapat dukungan dari masyarakat daerahnya sendiri. Selain itu faktor masih kurangnya perhatian dari calon terpilih Partai Gerindra sebelumnya terhadap masyarakat berupa program menjadi tantangan besar yang dihadapi untuk bisa meyakinkan para pemilih khususnya di Dapil 1.

Berbeda dengan kedua wilayah diatas, Kecamatan Ciamis sebagai kecamatan yang terletak di pusat kota memiliki tantangan yang dihadapi lebih

kepada bagaimana memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat karena persaingan yang cukup ketat mengingat Kecamatan Ciamis memiliki penduduk yang lebih banyak diantara kecamatan lainnya sehingga setiap partai akan bersaing maksimal untuk mendapatkan suara masyarakat, selain itu faktor masyarakat yang sudah cukup tereduksi menjadi tantangan tersendiri bagi partai untuk bisa meyakinkan para pemilih. Seperti diungkapkan oleh Bapak Supriyadi dalam wawancaranya yang menyatakan :

“Tantangan yang dirasakan paling berat dalam rangka meningkatkan elektabilitas, karena pemahaman masyarakat itu beragam kemudian partai juga banyak semua memberikan contoh terbaik. Pada akhirnya masyarakat silahkan masing-masing menilai. Jadi yang jadi tantangannya itu karena persaingan yang sangat ketat dengan banyaknya partai otomatis ketika ada iming-iming ataupun janji janji yang tidak dilaksanakan itu menjadi bumerang. Masyarakat kebanyakan kan sekarang itu pragmatis. Ketika mengatakan ya, mana, kan gitu. Ketika misalkan itu tidak tercapai kan otomatis” (Supriyadi, 16 Oktober 2022)

Variatifnya tantangan yang dihadapi setiap wilayah tentu memerlukan strategi yang bervariasi juga dengan menyesuaikan pada kondisi sosial di wilayah masing-masing. Di tingkat DPC strategi yang dilakukan adalah dengan berupaya untuk mengenalkan Partai Gerindra sampai ke *grass root* atau akar rumput seperti diungkapkan oleh Bapak Asep Halim dibawah ini:

“Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut tentu kita menyusun strategi dengan mengenalkan kepada masyarakat mengenai Partai Gerindra sampai ke *grassroot* sehingga masyarakat benar-benar mengenali Partai Gerindra itu seperti apa sehingga berdampak pada perolehan suara Partai Gerindra.” (Asep Halim Jamaludin, 14 Oktober 2022)

Di Sindangkasih yang notabene punya dominasi kuat dari PDIP dan PPP lebih menggunakan politik adab dengan menempatkan orang-orang yang ditunjuk

untuk memberikan pengaruh pada pemilih yang didominasi oleh partai lain yang disebut dengan istilah *ulat* seperti yang diungkapkan oleh Bapak Enung Ruhimat :

“Kalo saya sistemnya ada yang namanya ulat di tiap desa, contohnya satu wilayah udah dikuasai oleh PDI, satu wilayah udah dikuasai Demokrat. Gampang, saya harus punya ulat disana satu. Ini politik saya ya. Saya bahasanya politik adab, enggak brutal, karena nggak punya kekuatan justru pake otak dan pikiran.” (Enung Ruhimat, 19 Oktober 2022)

Kemudian, untuk menghadapi sentimen kedaerahan yang cukup kuat di Sindangkasih, Bapak Enung Ruhimat maju sebagai salah satu caleg dari Gerindra untuk dapil 1 di Sindangkasih dan mampu meraup suara sebanyak 882 suara di sindangkasih dan merupakan pemilik suara terbanyak di Sindangkasih diantara 8 calon lainnya yang hanya memperoleh suara antara 100- 400 suara saja.<sup>9</sup>

Adapun untuk wilayah Kecamatan Sadananya dan Kecamatan Ciamis, strateginya adalah strategi yang umum dilakukan seperti mengajak tokoh masyarakat untuk sharing dan memberikan wawasan serta pemahaman terkait Partai Gerindra serta menggunakan sayap-sayap partai sebagai salah satu alternatifnya.<sup>10</sup>

#### **4.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Elektabilitas Suara Partai Gerindra Kabupaten Ciamis**

##### **A. *Coattail Effect***

*Coattail Effect* atau efek ekor jas adalah satu istilah yang merujuk pada kecenderungan kandidat populer dalam satu level pemerintahan dapat menyebabkan pemilih memilih kandidat dari partai yang sama dengan kandidat

---

<sup>9</sup> Sumber data : Salinan Rekapitulasi Suara Hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis oleh KPU Kabupaten Ciamis

<sup>10</sup> Lihat Lampiran X Hasil Wawancara Penelitian dengan Ketua PAC Gerindra Kecamatan Ciamis dan Kecamatan Sadananya

populer tersebut untuk level pemerintahan yang lain (Zudencova dalam Apriani, 2019, hal. 14).

Kemudian, definisi lain menyatakan bahwa *Coattail effect* adalah istilah yang merujuk pada suatu tindakan yang menimbulkan pengaruh pada tindakan lain (pengaruh ikutan), calon pemimpin yang diusung memiliki efek ekor jas terhadap elektabilitas suara pada partai pengusung (Yunus dalam Cahyono, 2021, hal. 6).

*Coattail effect* tidak terlepas dari diselenggarakannya pemilihan presiden dan wakil presiden yang bersamaan dengan pemilihan legislatif. Efek tersebut terjadi disaat pemilih memilih secara berurutan dan disaat Pemilu diselenggarakan serentak lebih banyak pemilih yang memutuskan kandidat lokal terlebih dahulu sebelum memilih daftar partai (Rheault et al. dalam Cahyono, 2021, hal. 6).

Adapun dalam Pemilu 2019 *Coattail Effect* yang terjadi adalah *Presidential Coattail Effect* dimana calon legislatif dari suatu partai tertentu dipilih karena performa dari pemerintahannya atau dalam kasus ini figur orang yang berada di atasnya yakni calon presiden.

Seperti kita ketahui, pada Pemilu 2019, Pemilihan Legislatif diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara menurut Rheault et al. dalam Cahyono (2021, hal. 6) menyatakan bahwa *Coattail effect* tidak terlepas dari diselenggarakannya pemilihan presiden dan wakil presiden yang bersamaan dengan pemilihan legislatif.

Pelaksanaan pemilihan secara serentak atau bersamaan menimbulkan pengaruh yang cukup kuat baik dari atas ke bawah atau sebaliknya. Dalam hal ini Prabowo selaku calon Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra memiliki

pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan perolehan suara Gerindra di Kabupaten Ciamis. Hal ini dapat kita lihat dalam hasil wawancara dengan Bapak Asep Halim selaku Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa:

“Dengan Prabowo mencalonkan diri dalam Pilpres itu efek kesininya bagus. Kadang-kadang masyarakat itu tidak kenal dengan partai atau calonnya ya tapi suka dengan Prabowo karena salah satu pemimpin yang punya komitmen, ketegasan, yang punya pengalaman, yang punya tujuan mensejahterakan, sehingga pasti berdampak. Kejadian 2019 itu luar biasa efeknya ada sehingga banyak masyarakat yang senang ke Prabowo tidak suka ke calegnya sehingga pada memilih partainya gitu. Jadi kadang-kadang gini kan, pimpinan nasional belum tentu berefek terhadap bawahannya ya tapi selama ini pak Prabowo itu punya efek positif terhadap hasil Pemilu. Jadi orang yang bukan kader yang tidak suka ke partai juga suka ke pak Prabowo nya pasti nyoblosnya Gerindra. Karena walaupun nyoblos ke partainya kan tetapi diperhitungkan. Itu tidak semua partai seperti itu. Nah kita efeknya itu luar biasa. Perolehan suara ciamis juga itu dampaknya sampai 60%an itu suara yang masuk ke suara partai.” (Asep Halim Jamaludin, 14 Oktober 2022)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Tatang Lesmana dan Bapak Enung Ruhimat seperti pada pernyataan dibawah ini :

“Kebetulan kalo kita lihat dari hasil perolehan suara, para peserta itu banyak yang memilih ke partai politiknya. Bukan memilih ke calegnya. Tapi kebetulan di dapil 1 Pa Heri Rafni yang menjadi caleg dan sekarang *incumbent* tapi sekarang nyalon untuk tingkat Provinsi memang besar ya 6000an lebih. Ini bukan kebetulan, karena waktu itu Gerindra punya calon presiden pak Prabowo yang notabene banyak masyarakat yang suka dengan pak Prabowo dan mungkin waktu itu mereka PAC ataupun pengurus rantingnya tidak bisa memasarkan si calonnya. Masyarakat itu hanya senang ke Gerindra, jadi tanpa di pasarkan, bisa juga. Jadi hanya figuritas pak Prabowo disana. Jadi kenapa ya memang sekarang masyarakat makin lama makin mengerti tentang perpolitikan. Kalau dulu saya lihat mungkin orang-orang itu hanya pilih Gerindra saja, mungkin orang awam. Sudah tidak peduli lagi, dan mungkin salah satunya targetan dari PAC itu, udah kalau nggak tau harus memilih caleg yang mana mungkin coblos aja partainya dan itu mungkin salah satu trik yang berhasil mereka bawa.” (Tatang Lesmana, 16 Oktober 2022)”

“Betul. Elektabilitas partai tergantung figur. Nggak tau kalau misalnya Gerindra dipegang sama Fadli Zon. Tapi karena masih pak Prabowo disana yang masih mencalonkan. Soalnya kan Jawa Barat itu identiknya Prabowo. Figur memang yang menentukan elektabilitas. Pemilih bisa beralih, bukan karena uang tapi karena nurani. Walaupun dibeli gimana2 tetep saya Prabowo. Ada juga caleg yang bilang sok aja pilih Prabowo enggak Jokowi juga yang penting pilih saya. Begitu bahasanya. Jadi figur juga yang menentukan. Kemarin PDI ada penurunan suara itu salah satunya karena figur Prabowo.” (Enung Ruhimat, 19 Oktober 2022)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari tiga narasumber lain yakni Bapak Muharram Kurnia Drajat selaku Komisioner KPU Ciamis, Bapak Syamsul Maarif selaku Komisioner Bawaslu Ciamis dan Bapak H. Agus Dedi selaku Akademisi seperti pada pernyataan dibawah ini,

“Itu fenomena nya kan karena dipengaruhi oleh Pilpres kan fenomena nya apa Pemilihan Presiden, karena kan di Indonesia kan biasanya Pilpres itu sangat mempengaruhi gitu kan terkait dengan pileg gitu kan, misalnya di 2004 ketika megawati dengan SBY kan. Ketika ada apa Pilpres antara Megawati dengan SBY pada waktu itu kan demokrat langsung naik kan signifikan, begitu juga di 2019 kemarin, ketika terjadinya Pilpres yang *head to head* antara Jokowi dengan Prabowo dan Prabowo kan diusungnya oleh Gerindra sehingga kan Gerindra langsung melesat gitu kan yang tadinya 2 kursi kalo gak salah eh satu kursi itu langsung jadi 7 kursi terus juga melihat peta di Jawa Barat juga kan Gerindra yang tadinya di bawah bisa naik menjadi pemenang Pemilu kan di Jawa Barat, ya itu mungkin seperti itu jadi fenomena ya karena masyarakat di kita mah ya mungkin tidak terlalu apa ya tidak terlalu ideologis gitu kan jadi nya nu rame na kamana kitu sehingga itu yang didukung baik presidennya maupun partainya gitu kan. Itu mungkin seperti itu.” (Muharram Kurnia Drajat, 28 Januari 2023)

“Faktor elektabilitasnya itu dipengaruhi oleh Pilpres. Jadi figur seorang Prabowo itu bisa menjadi indikator khususnya peningkatan kursi. Apalagi kemarin adanya kampanye umum calon presiden di Ciamis yang lokasinya di lokasana yaitu dengan datangnya langsung calon presiden Pak Prabowo. Itu sangat mempengaruhi terkait kenaikan elektabilitas partai. Karena sebelumnya kan Gerindra itu hanya 1 kursi sebelum pemekaran, setelah pemekaran 4 kursi dan di 2019 itu sampe 7 kursi.” (Syamsul Maarif, 24 November 2022)

“Kalo saya lebih melihat begini ya, bukan faktor internal disini. Karena pengaruhnya nggak begitu besar. Saya melihat justru karena keberadaan Pak Prabowo sebagai calon presiden, jadi ekor jas itu. Lebih ke arah sana.

Karena pak Prabowo itu calon, jadi berdampak ke daerah. Jadi bukan karena sosok si kandidatnya itu, tapi karena faktor pak Prabowo nya. Karena begini, hasil penelitian ya hubungan antara masyarakat dengan calon, itu hanya berapa persen hubungan keterkenalannya itu, jadi masyarakat memang nggak tau siapa sih calonnya bagaimana track recordnya gitu. Tapi karena faktor yang diatas itu. Itu yang saya lihat seperti itu.” (Agus Dedi, 11 November 2022)

Dari uraian pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa semua narasumber tersebut sepakat bahwa Prabowo memberikan efek yang cukup besar terhadap perolehan suara Partai Gerindra di Kabupaten Ciamis disamping dari Caleg-caleg yang ditawarkan kepada masyarakat. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan salah satu dewan penasehat PAC Gerindra Kecamatan Ciamis yang bernama Galih yang menyatakan bahwa :

“Kemenangan Gerindra di Ciamis itu gak ada strategi khusus, itumah Cuma *coattail effect* Prabowo saja. Gak ada strategi-strategi khusus yang dilakukan Gerindra. Peningkatan elektabilitas atau suara partai di Jawa Barat khususnya di Ciamis itu karena pengaruh efek ekor jas dari Prabowo. Sekitar 60-80% masyarakat Jawa Barat itu kecewa karena masuknya Prabowo ke pemerintahan (Menjadi menteri pertahanan) jadi, di 2024 itu pengaruh Prabowo tidak akan sekuat seperti yang terjadi di 2019 kemarin sehingga efek ekor jas juga bisa saja tidak terjadi lagi”.<sup>11</sup>

Jika melihat pada data salinan rekapitulasi suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Partai Gerindra memperoleh suara partai dengan total sebanyak 26.209 suara dengan rincian sebagai berikut : Dapil 1 : 6.138 Suara; Dapil 2 : 3.582 Suara; Dapil 3 : 3.658 Suara; Dapil 4 : 3.747 Suara; Dapil 5 : 3.875 Suara; Dapil 6 : 5.199 Suara. Jika dilihat dalam persentase perbandingan dengan suara partai lain dan keseluruhan suara yang didapatkan termasuk perolehan suara

---

<sup>11</sup> Lihat Lampiran XI Catatan Lapangan IV

caleg maka Perolehan suara Partai Gerindra cukup besar. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.13**  
**Perbandingan Perolehan Suara Antar Partai dalam Pemilu Legislatif**  
**Tahun 2019 di Kabupaten Ciamis**

Partai Politik	Perolehan Suara Partai						Jumlah Suara Partai	Jumlah Suara Total	Persentase
	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6			
Gerindra	6,138	3,582	3,658	3,757	3,875	5,199	26,209	85,181	30.77%
PDIP	5,637	3,199	3,866	4,579	6,002	5,245	28,528	124,642	22.89%
Golkar	1,928	2,032	1,539	3,173	2,856	2,293	13,821	60,018	23.03%
PPP	3,090	1,697	1,546	1,357	2,101	1,878	11,669	58,186	20.05%
PKS	5,364	2,923	3,266	3,750	2,294	3,416	21,013	106,347	19.76%
PAN	2,670	1,342	3,489	1,977	2,952	1,467	13,897	83,284	16.69%
Demokrat	2,209	1,225	1,318	1,344	1,489	1,721	9,306	49,465	18.81%

Sumber : (Diolah dari data KPU Kabupaten Ciamis, 2019b)

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa Partai Gerindra memiliki persentase suara partai yang paling besar diantara partai-partai lain dalam hal perbandingan selisih perolehan suara partai dengan perolehan suara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih cenderung memiliki kepercayaan yang lebih besar kepada Partai Gerindra dibanding dengan partai lainnya.

Hal tersebut juga didukung oleh beberapa survei dan hasil penelitian yang menunjukkan adanya efek ekor jas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan elektabilitas suara Partai Gerindra diantaranya dalam hasil survei yang dilakukan oleh Charta Politika pada 19-25 Maret 2019 yang menunjukkan bahwa sebanyak 34,9% responden memilih Partai Gerindra karena alasan tertarik dengan figur Prabowo. Kemudian, 30,6% responden memilih Gerindra karena mengukung Prabowo-Sandi di Pilpres (Ihsanudin, 2019).

*Coattail Effect* dari pengusungan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 juga dirasakan oleh partai lain seperti PAN dan PKS. Sebanyak 20% dari

pemilih PKS menyatakan memilih partai tersebut karena mengukung Prabowo-Sandi disusul faktor lain seperti 7% terbiasa memilih partai tersebut; 6% tertarik pada program partai; 4% tertarik pada figur caleg partai; lalu masing-masing 1% memilih PKS karena tertarik pada iklan/spanduk/baliho; tertarik pada sosok Sohibul Iman sebagai Presiden PKS; dan pernah mendapat sesuatu dari partai (Bomantama, 2019).

Lalu sebanyak 16,9 persen pemilih PAN menyatakan dukung Prabowo-Sandi; diikuti faktor 9,2 persen memilih partai karena tertarik pada figur caleg; 6,2 persen terbiasa memilih partai tersebut; lalu sebanyak 3,1 persen masing-masing memilih PAN karena tertarik pada program partai; tertarik pada sosok Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan; pernah mendapat sesuatu dari partai; dan lainnya (Bomantama, 2019).

Kemudian, dalam artikel yang ditulis oleh Amalia Salabi ia menyimpulkan bahwa *Coattail Effect* dari pasangan calon Prabowo-Sandi cukup signifikan terjadi pada partai politik asal calon, yakni Partai Gerindra. Adapun PKS, basis massa partai inilah yang memberikan *Coattail Effect* kepada Prabowo-Sandi bukan sebaliknya. Prabowo-Sandi menang di 8 daerah basis massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan persentase 22,2 persen. Artinya, figur Prabowo-Sandi cukup melekat dengan PKS. Basis massa PKS yang cukup besar menyumbang suara untuk pasangan calon (paslon) ini. Di semua dapil dengan perolehan suara PKS yang cukup besar (yakni antara 14 sampai 19,9 persen), Prabowo memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres). Tapi, tak semua dapil yang dimenangkan Prabowo-Sandi memberikan suara besar kepada PKS (Salabi, 2021).

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fithri Kartikasari ia menyimpulkan bahwa ada persamaan antara Gerindra dan PKS dalam melakukan strategi terkait pemanfaatan pada figur Prabowo adalah mereka melakukan kampanye dengan terus membawa nama Prabowo serta menekankan visi-misi serta program kampanye beliau baik dengan bertemu langsung dengan masyarakat ataupun dengan menggunakan sosial media. Dalam hal ini Gerindra cukup diuntungkan sebagai partai asal Prabowo, hal ini ternyata juga mempengaruhi pilihan *swing voters* pada hari-H pemilihan mencapai 20% suara. Yang membedakan kedua partai ini diluar pemanfaatan Prabowo adalah adanya temuan terkait kegiatan *money politic* oleh Gerindra dalam menunjang suara mereka pada Pemilu 2019 di Kota Padang (Kartikasari, 2020, hal. 95).

Selanjutnya, pemanfaatan visualisasi Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Gerindra dan PKS selain menjadi pertanda bahwa mereka secara maksimal dalam mendukung kemenangan Prabowo pada Pilpres, hal ini juga dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat untuk memperkenalkan siapa saja calon legislatif yang maju dari partai mereka dengan menyandingkan foto caleg tersebut bersama foto Prabowo disetiap APK yang dipasang baik berupa baliho, poster ataupun selebaran yang dibagikan pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Nur Rohim Yunus bahwa dalam pemanfaatan *coattail effect* Gerindra dan PKS berlomba-lomba mengidentikkan partai mereka dengan sosok Prabowo melalui visualisasi APK (Kartikasari, 2020, hal. 96).

Salah satu bentuk konkret pemanfaatan Visualisasi APK dapat kita lihat pada atribut kampanye salah satu caleg DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Gerindra berikut ini :

**Gambar 4.11**  
**Atribut Kampanye Caleg DPRD Ciamis dari Partai Gerindra**



Sumber : Arsip Sekretariat DPC Partai Gerindra Kabupaten Ciamis  
<https://images.app.goo.gl/aj2cbFJKGPqne8dG7>  
<https://images.app.goo.gl/YzkDHArCr3zHibKj7>

Hal tersebut diperkuat juga dengan data hasil Pilpres yang menunjukkan bahwa Kehadiran Prabowo dalam kegiatan kampanye terbuka di Kabupaten Ciamis juga menjadi salah satu faktor kuatnya pengaruh Prabowo terhadap peningkatan elektabilitas suara Gerindra, hal itu dapat kita lihat pada perolehan suara Prabowo-

Sandi di Ciamis yang memiliki selisih cukup jauh dengan Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dimana Capres nomor urut 2 mendapatkan perolehan suara sebesar 59,21% atau sebanyak 440.240 suara sedangkan Capres nomor urut 1 mendapatkan perolehan suara sebesar 40, 79% atau sebanyak 303.323 suara.<sup>12</sup> Dengan perbandingan suara yang cukup jauh tersebut maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Ciamis merupakan wilayah dengan basis pemilih Prabowo Subianto (KPU RI, 2019).

Dari uraian data dan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *coattail effect* memiliki pengaruh cukup besar terhadap peningkatan elektabilitas dan perolehan suara Partai Gerindra dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Ciamis.

### **B. Money politic**

Peraturan terkait *money politic* di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni pada pasal 523 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).” Pasal 523 ayat (1)

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).” Pasal 523 ayat (2)

---

<sup>12</sup> Lihat Lampiran VII Dokumentasi Pendukung Pra Penelitian

“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Pasal 523 ayat (3)

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa yang disebut sebagai praktik *money politic* adalah praktik perjanjian imbalan dan/atau pemberian uang atau materi yang dilakukan secara sengaja oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, setiap narasumber tidak menyangkal adanya praktik *money politic* yang dilakukan Partai Gerindra baik dari pengurus maupun para caleg dalam pelaksanaan Pemilu 2019 kemarin.

Bapak Asep Halim Jamaludin menyatakan bahwa,

“Sebetulnya kalau partai itu menginstruksikan ke para caleg agar tidak melakukan *money politic*, karena yang namanya *money politic* itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali memang ada aturan-aturan KPU yang diperbolehkan misalnya dalam acara pertemuan kan itu diperbolehkan misal 25 ribu itu mah ketentuan. Tapi diluar itu kan tidak boleh dan tentunya pelaksana pengawasan itu kan Bawaslu jadi partai itu tidak sampai mengawasi di lapangan karena ada petugas yang berwenang dari bawaslu. Diharapkan kita ke kader untuk tidak melakukan hal seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di lapangan tapi selama ini tidak ada laporan dari bawaslu atau dari mana bahwa kandidat kita ada yang melakukan *money politic*. “ (Asep Halim Jamaludin, 14 Oktober 2022)

Kemudian Bapak Supriyadi juga menyatakan bahwa,

“Mungkin semua juga berjalan seperti itu, bukan munafik ya karena tau kondisi masyarakat, bahwa mereka itu berpandangan keterbatasan wawasan pengetahuan jadi mereka itu taunya uang. Jadi mungkin semua juga menggunakan seperti itu tapi kuantitasnya seperti apa itu saya nggak tau. Hal itu karena masyarakat banyak yang masih berpikir pragmatis. Pilih aja asalkan ada bayarannya. Mungkin nggak tahu 10 atau 20 tahun kedepan mungkin akan tetap seperti itu. Nah itu tantangan kita jadi mereka harus

diajarkan untuk bagaimana politik yang baik itu.” (Supriyadi, 19 Oktober 2022)

Dua pernyataan di atas mengindikasikan bahwa praktik *money* politik adalah praktik yang tidak bisa dihindari dalam Pemilu meskipun telah dilakukan upaya pencegahan, himbauan dan pengawasan baik dari Partai politik maupun panitia Pemilu akan tetapi seperti diungkapkan dua narasumber di atas, hal tersebut tetap tidak memberikan jaminan praktik *money politic* dapat dicegah atau dihindari. Karena terdapat faktor kultur masyarakat juga yang masih berpikir pragmatis. Meskipun hal tersebut disangkal oleh bapak Agus Dedi dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa,

“Kalau saya pikir bukan tuntutan dari masyarakat ya justru si calon itu karena ingin meraih suara sementara masyarakat pendidikannya rendah mereka tidak paham politik kan gitu ya cuma yang mereka butuhkan adalah hal-hal yang konkrit salah satunya adalah uang. celah-celah itulah yang dimanfaatkan Oleh si calon Bagaimana supaya dia didukung oleh masyarakat. saya nggak setuju ya kalau itu merupakan tuntutan masyarakat Jadi kalau tuntutan masyarakat nggak Tapi kalau masyarakat butuh uang ya. tapi kan kembali ke si kandidat itu sendiri. jadi terkadang dia juga melihat bahwa masyarakat itu butuh uang dan itu adalah peluang Nah itulah strategi itu digunakan meskipun di dalam aturan itu tidak boleh. dan itu juga banyak dilakukan oleh banyak partai.” (Agus Dedi, 11 November 2022)

Beliau juga melihat faktor pendidikan masyarakat yang menjadi faktor utama praktik *money politic* tetap menjadi strategi yang dilakukan partai politik pada umumnya dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat dalam Pemilu.

Selanjutnya pernyataan dari Ketua PAC Cikoneng, Sindangkasih dan Sadananya memberikan pernyataan dari sudut pandang yang sedikit berbeda seperti diuraikan dibawah ini,

“Sebetulnya tergantung orang menyikapinya, contoh seperti ini, tatkala ada rapat kita membagikan uang, kalau misalnya membagikan uang karena alasannya bukan uang duduk ya itu *money politic*, tapi kalau misalnya itu kan buat uang duduk ganti biaya transport, dan itu sudah dilindungi oleh peraturan, tidak boleh lebih dari sekian rupiah, kalau lebih dari sekian rupiah itu namanya *money politic*. Contoh uang duduk 25 ribu itu wajar tidak masalah bukan *money politic* tapi kalau lebih dari 100 ribu itu *money politic* karena tidak wajar. Jadi saya tidak bisa menyebutkan dulu di 2019 dari Partai Gerindra itu ada *money politic* atau tidak, tergantung dia diamnya dimana. Kalau di lawan politik pasti menyatakan itu *money politic*.” (Tatang Lesmana, 16 Oktober 2022)

“Ada saja. Kalau Gerindra sindangkasih mungkin itu tergantung sama pelaku-pelakunya. Tadi sudah saya katakan kalo politik itu menghalalkan segala cara salah satunya itu. Soalnya apa. Pertama nggak tau, otomatis pake kaya gitu. Contohnya daerah cikoneng dulu disana udah dikuasai oleh kang toni dari PPP. Malam hari sebelum hari H ada serangan fajar dari kang Dida. Akhirnya kan kalah. Memang kalo *money politic* itu dibilang salah ya salah tapi kan politik itu segala cara. Cuma kalo saya dulu. Nggak pake *money politic* itu ada bahasa lagi. Karena saya orang sini bahasanya kaya gini. Pak RW mau ngasih berapa? Ada waktu saya nyalon dulu 2019 gitu. Saya jawab maunya berapa? 50 ribu. Deal. Tapi 1 nggak akan kenal dengan saya nantinya 2 kalo mau ada apa-apa minta ke orang lain. Kenapa kaya gitu? Kan saya milih kamu. Kan sudah saya beli nggak ada hak lagi. Kecuali kamu mau apa? mau genset atau apa baru saya belikan kalo buat masyarakat. Kalo gitu saya kasih karena nggak berupa uang. Cuma kalo uang mohon maaf. Beda yaa. Soalnya untuk kepentingan umum. Ada yang seperti itu? Ada walaupun ujung-ujungnya dengan uang 50 ribu masih tetep kalah. Contohnya saya genset beli 4, dibawa lagi kesini karena suaranya nggak sampai target. Kalo dihitung itu hampir 4 juta setengah. Kalo saya sok aja karena itu buat kepentingan umum. Beda sama uang.” (Enung Ruhimat, 19 Oktober 2022)

“Untuk *money politic*, namanya juga orang politik, meskipun ada tapi namanya lain. Biasanya kalau *money politic* kan dominannya di kasih amplop, kalau di kita itu lain, kita ngumpul, kita ajak ngopi, ngeroko, makan, nah itu sama juga itu *money politic*. Cuma berupanya makanan atau apa gitu. Gak langsung berupa uang. Kalo berupa barang kan bukan *money politic*. Jadi tidak ada dalam undang-undang dikasih seragam atau dikasih baju itu bukan *money politic* karena berupa barang. Sampai saat ini saya belum pernah membagikan uang untuk membeli suara.” (Wawan Hanurawan, 14 Oktober 2022)

Ketiga narasumber diatas menyatakan bahwa *money politic* itu bergantung pada persepsi masing-masing pihak dan pada apa objek yang diberikan. Meskipun

demikian, hal tersebut dibantah oleh Komisioner Bawaslu Ciamis yang menyatakan bahwa,

“Enggak ada batasan, yang namanya *money politic* itu jumlahnya berapapun itu masuk *money politic*. terkait pemahaman mengenai batasan, itu bukan batasan *money politic*, yang 25 ribu untuk uang bensin memang itu awalnya ada tetapi kami dari Bawaslu itu memandang bahwa itu adalah salah satu bagian dari *money politic*. Makanya KPU membuat regulasi, awalnya kan KPU itu membolehkan peserta Pemilu itu memberikan uang transport kepada konstituen ketika kampanye. Terus kami merekomendasikan agar tidak adanya biaya transport dalam kampanye. Itu kan 25 ribu ada batasannya, transport. Jadi bukan batasan *money politic*. *money politic* itu bukan hanya uang. Jadi barang ataupun materi lainnya yang mengandung materi. Misal contohnya beras, minyak goreng. Itu masuk dengan *money politic*. Jadi tidak ada batasan. Kalaupun ada batasan, itu bukan *money politic* tapi pemberian alat bahan kampanye. Nah yang ada batasan itu adalah alat dan bahan kampanye. Contohnya apa, kaos yang tidak boleh misalkan melebihi batas harganya itu 50 ribu atau 60 ribu. Penutup kepala baik kerudung ataupun topi, payung. Itukan ada nama dan nomor urut partai politik ataupun calegnya. Peserta Pemilu disana ada identitasnya. Nah itu standarnya ada, ditentukan oleh peraturan KPU. Jadi batasan itu bukan batasan *money politic*. ada batasan di PKPU itu terkait batasan harga alat dan bahan kampanye.” (Syamsul Maarif, 24 November 2022)

Dari masyarakat sendiri juga mengkonfirmasi bahwa *money politic* itu pasti ada<sup>13</sup> kemudian Bawaslu juga menemukan adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh caleg DPRD Ciamis di dapil 1 dan caleg DPR pusat dari Partai Gerindra namun temuan tersebut tidak sampai pada proses penyelidikan karena tidak terpenuhinya syarat moril dan materil.

Jika berdasar pada aturan *money politic* yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, pernyataan dari beberapa narasumber yang melihat *money politic* tergantung dari persepsi tentu tidak dapat dibenarkan karena dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa praktik money politik adalah segala bentuk perjanjian

---

<sup>13</sup> Lihat Lampiran X Hasil Wawancara Penelitian Dengan Masyarakat Umum

imbalan dan/atau pemberian uang atau materi yang dilakukan secara sengaja oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara.

Dari beberapa pernyataan dan penjelasan diatas maka dapat kita lihat bahwa *money politic* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan elektabilitas suara Partai Gerindra. fakta tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Kartikasari (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Kontestasi Gerindra dan PKS dalam Memanfaatkan *Coattail Effect* Pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Padang” yang menemukan bahwa *money politic* juga memberikan pengaruh terhadap perolehan suara Partai Gerindra khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat.

### **C. Kultur Sosio-Religi Masyarakat Ciamis**

Menurut Gazalba (dalam Ghufron, 2012) religiusitas berasal dari kata religi dalam bahasa Latin “religio” yang akar katanya adalah religure yang berarti mengikat. Dengan demikian, mengandung makna bahwa religi atau agama pada umumnya memiliki aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Kesemuanya itu berfungsi mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya (Satrio, Budiharjo, & Prasetyani, 2020)

Glock dan Stark (dalam Jalaluddin, 2012) mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang didalamnya mencakup tata cara

ibadah wajib maupun sunat serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu.

Seperti telah diungkapkan dalam latar belakang bahwasannya, pelaksanaan pemilu 2019 syarat dengan politik identitas dan polarisasi masyarakat yang telah terbentuk di tahun-tahun sebelumnya. Politik identitas dan preferensi pemilih adalah dua hal yang saling berhubungan. Dengan kuatnya politik identitas akan sangat mempengaruhi pilihan pemilih dalam suatu pemilu. Seperti yang dikemukakan oleh Gani (dalam Fernandes, 2018:4) dalam risetnya. Ia menunjukkan pentingnya politik identitas dalam hal ini agama sebagai salah satu faktor penentu kemenangan pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Temuan Gani menunjukkan Anis menang di kelurahan-kelurahan dengan kantong pemilih muslim yang besar dan di daerah padat penduduk. Sementara suara Ahok rendah di daerah dengan populasi pemilih muslim yang besar dan suara Ahok tinggi di daerah-daerah di basis Jokowi pada Pilkada 2012 (Irawan, 2018).

Dibandingkan efek politik elektoral terhadap naik atau turunnya suara pasangan calon atau partai, efek massa aksi 212 justru terjadi pada menguatnya konservatisme di kalangan pemilih. Mietzner dan Muhtadi (2018) menemukan bahwa sebelum mobilisasi aksi 212 justru konservatisme agama di kalangan pemilih muslim tengah mengalami penurunan dalam rentang 2010 sampai 2016. Dalam publikasi yang berbeda, Mietzner, Muhtadi dan Halida (2018) menjelaskan mobilisasi (212) mempengaruhi terjadinya peningkatan dukungan terhadap agendaagenda politik Islam. Temuan survei LSI seperti dikuti oleh Mietzner, dkk

juga menunjukkan adanya kenaikan terhadap rata-rata penolakan terhadap non-muslim dalam mengisi jabatan politik dari 42.3% pada 2016 menjadi 49.6% pada 2017. Mobilisasi aksi 212 juga didorong karena sebelumnya adanya penolakan pemilih terhadap non-muslim dalam politik dan penolakan terhadap hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Dari sisi pendidikan dan pendapatan, Mietzner, Muhtadi dan Halida (2018) menemukan tidak ada hubungan antara dukungan kepada ide-ide islamis dengan pendidikan dan pendapatan (Irawan, 2018).

Politik identitas mengalami penguatan bila kontestasi antar-kandidat cukup kuat terutama di daerah dengan komposisi latar-belakang pemilih yang berimbang, baik dari sisi agama, suku, atau ras. Bila kondisi tersebut tidak terjadi, biasanya politik identitas tidak akan mengental seperti DKI Jakarta. Pada tingkat nasional, pengaruh Pilkada DKI Jakarta dan Aksi 212 lebih terasa di kalangan elit politik dibandingkan pemilih. Dua peristiwa tersebut mempengaruhi perilaku dan pilihan politik partai dan calon presiden dalam menentukan kebijakan dan sikap politik terkait pilpres. Dari sisi Joko Widodo, pembatalan nama cawapres Joko Widodo dari Mahfud MD menjadi Ma'ruf Amin (Rais Am PB Nahdlatul Ulama) secara cepat, menunjukkan strategi politik untuk merebut suara pemilih muslim. Sementara, dari sisi Prabowo menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan elit politik muslim dalam penentuan cawapres. Elit tersebut tergabung dalam ijtima' ulama GNPF (Gerakan Nasional Penjaga Fatwa) MUI, yang dilaksanakan hingga dua kali (Irawan, 2018).

Di Jawa Barat sendiri, menurut pengamat politik Universitas Padjajaran, Idil Akbar, “masyarakat Jawa Barat masih melandaskan pilihannya di Pilpres 2019 pada faktor agama. Meski ada pergeseran dalam hal rasionalitas, tapi itu tidak signifikan.”. Ia juga menemukan bahwa masih termakan isu miring tentang gempuran tenaga kerja China ke Indonesia dan membengkaknya utang pemerintah (Pasaribu, 2019).

Dari segi statistik, dalam dua pemilu terakhir, Prabowo selalu mengungguli perolehan suara Jokowi di Jawa Barat. Pada 2014, perolehan suara Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa pada pilpres 2014 meraih 14,17 juta (59,78%) suara unggul sekitar 4,64 juta suara dari Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla dengan meraih 9,53 juta (40,22%) suara. Raihan suara Prabowo di Tanah Pasundan ini sekitar 10% dari total suara pada pilpres 2014 (Katadata Media Network, 2019).

Kemudian, pada pemilu 2019 Berdasarkan rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU Jabar, pasangan Jokowi-Ma'ruf meraih 10.750.568 suara. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga 16.077.446 suara. Dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, pasangan Prabowo-Sandiaga berhasil menguasai perolehan suara di 21 daerah. Sementara pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf hanya unggul di 6 daerah. Di antaranya di Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Subang. (Solehudin, 2019).

Pengamat politik Universitas Padjajaran, Firman Manan mengatakan bahwa dominasi suara untuk Prabowo-Sandi di Jabar tak lepas dari karakteristik religius pemilih di tanah pasundan. Selain itu, sejumlah isu yang diembuskan sejak Pilpres

2014 mulai dari PKI hingga kriminalisasi ulama yang ditudingkan pada Jokowi juga dinilai 'berhasil'. Berbagai dukungan dari ustaz beberapa waktu belakangan juga dinilai berpengaruh pada perolehan suara Prabowo-Sandi di Jabar. Sebut saja ustaz Abdul Somad, Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym, hingga Adi Hidayat. (CNN Indonesia, 2019).

Firman mengatakan, tingginya perolehan suara Prabowo-Sandi ini juga tak lepas dari fenomena yang terjadi di pemilihan gubernur Jabar pada 2018. Saat itu, meski Ridwan Kamil meraih suara tertinggi, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhul yang diusung Gerindra-PKS mampu mendongkrak perolehan suara hingga berada di posisi dua. Hasil ini berbeda dengan sejumlah survei yang selalu menempatkan Sudrajat-Syaikhul di posisi ketiga di bawah pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyana (CNN Indonesia, 2019).

Pola serupa juga terjadi di DKI Jakarta. Dari sejumlah hasil hitung cepat, Jokowi-Ma'ruf hanya unggul tipis dengan Prabowo-Sandi. Menurut Firman, hal itu juga dipengaruhi pola yang terjadi dalam Pilgub DKI 2017 dan sejumlah aksi bela Islam berjilid 411, 212, hingga 313 yang beberapa kali digelar. Hal senada disampaikan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego. Ia menilai, basis massa Islam yang kuat di Jabar menjadi faktor tingginya perolehan suara Prabowo-Sandi. Keberhasilan ini tak lepas dari kinerja PKS sebagai salah satu pengusung calon nomor urut 02 itu di Jabar (CNN Indonesia, 2019).

Jika melihat pada kondisi sosiologisnya, masyarakat Jawa Barat sangat identik dengan Islam. "Islam itu Sunda, Sunda itu Islam". Jargon ini konon

dicetuskan H. Endang Saifuddin Anshari (putra Isa Anshari). Jakob Sumardjo dalam *Paradoks Cerita-cerita Si Kabayan* (2014) menerangkan, hal itu mulanya dilatari karakter masyarakat Sunda yang berbasis huma atau ladang. Menurutnya, dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Jawa yang berdasarkan sawah yang menetap, kebudayaan istana di kerajaan-kerajaan Sunda hanya berkembang di lingkungan terbatas masyarakat negara (Teguh, 2019).

Masyarakat negara adalah masyarakat Sunda yang berada di wilayah yang benar-benar dikuasai kerajaan secara langsung. Di luar wilayah kekuasaan kerajaan, masih terdapat kampung-kampung Sunda yang berpindah-pindah karena hidup berladang. Hidup yang berpindah-pindah membuat hubungan antara istana dan rakyat di luar wilayah kekuasaan amat tipis. Maka di zaman penyebaran agama Islam di Jawa Barat, para pendakwah Islam leluasa keluar-masuk kampung-kampung Sunda. Tidak mengherankan apabila di kalangan masyarakat Sunda di perdesaan kenangan terhadap zaman kebudayaan Hindu amat tipis. Bahkan beberapa di antara mereka tidak mengenal sama sekali zaman seperti itu. “Mereka percaya bahwa agama Islam itu sudah sejak awalnya ada di Sunda. Sunda itu Islam,” tulis Jakob Sumardjo (Teguh, 2019).

Dalam sebuah seminar pada 23-24 Desember 1989 tentang “Islam dan Sosial Budaya Sunda: Antara Cita dan Realita”, seperti dikutip Moeflich Dasbullah dalam *Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara* (2017), sejumlah sejarawan dan budayawan sepakat bahwa budaya Sunda identik dengan Islam. “Masyarakat Sunda tetap sebagai etnis Muslim yang kuat. Sunda, kata Dawam Rahardjo, seperti halnya Melayu, Makassar, dan Madura, secara kultural identik dengan Islam,”

tulisnya. Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, Pemilu 1955, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019 adalah pemilu-pemilu yang kondisinya paling panas karena kekuatan Islam seolah-olah dihadapkan secara langsung dengan seteru yang wajib ditumbangkan. Saat Masyumi bertempur pada 1955 dan Prabowo serta pasangannya—yang dianggap merepresentasikan Islam—dua kali menghadapi Jokowi pada 2014 dan 2019, mayoritas masyarakat Jawa Barat sama-sama berpegang pada identitas Islam. Di titik ini, wajar jika Jokowi dua kali menjadi pecundang di Tatar Pasundan (Teguh, 2019).